

E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik

Chairun Nisa Zempi¹, Siti Maryam², Priyono³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail : nisazempi@upnvj.ac.id¹, sitimaryam@upnvj.ac.id²,
priyonosadjjo@upnvj.ac.id³

ABSTRAK

Sistem terdesentralisasi merupakan konsep pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan masing-masing daerah. E-government hadir sebagai realisasi sistem sosial dan politik yang terdesentralisasi dan dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. E-government merupakan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Berbagai macam program yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti e-sdm, e-monitoring, e-education, e-office, e-permit, e-health dan media center. Di Indonesia perkembangan e-government masih perlu ditingkatkan, beberapa masalah yang timbul seperti kurangnya sosialisasi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, yang masih belum lengkap, kendala akses yang masih sangat sulit untuk beberapa daerah, dan pelayanan e-government yang belum memadai. Oleh karena itu diperlukan kontribusi bersama antara pemerintah, swasta, media dan masyarakat untuk mewujudkan sistem e-government sebagai langkah menuju open government dan good governance

Kata kunci : Desentralisasi, E-government, Demokrasi

ABSTRACT

The decentralized system is the concept of granting authority by the central government to local governments to determine the policy direction of each region. E-government is present as the realization of a social and political system that is decentralized and mediated by information and communication technology. E-government is the use of technology by the government to provide effective and efficient information and services to the public. The community can enjoy various programs, such as e-monitoring, e-education, e-office, e-permit, e-health, and media center. In Indonesia, the development of e-government still needs to be improved. Several problems arise, such as lack of government socialization, limited human resources, infrastructure, which is still incomplete, access constraints are still challenging for some regions, and inadequate e-government services. Therefore, a joint contribution is needed between the government, the private sector, the media, and the community to realize an e-government system as a step towards open government and good governance.

Keyword : Decentralization, E-government, Democracy

1. PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998, menjadi tanda awal bagi bangsa Indonesia sebagai bentuk perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi. Sebelumnya pada masa orde baru Indonesia menganut sistem pemerintahan yang terpusat atau resentralisasi dimana wewenang dan segala urusan pusat maupun daerah dikelola oleh pemerintahan pusat. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan pada masing-masing daerah di Indonesia dan sulitnya bagi daerah-daerah tertentu untuk berkembang. Disamping itu, kebijakan ini membuat beban kerja pemerintah pusat semakin bertambah, dimana segala sesuatu yang mencakup urusan daerah sampai negara menjadi tanggung jawab pusat, pemerintah daerah hanya mengikuti apa yang diperintahkan, sehingga aturan-aturan yang dibuat akan menjadi tidak tepat sasaran (Haris, 2007) sebagai contoh pada era orde baru kebanyakan upaya pembangunan hanya berfokus kepada pulau jawa saja, sehingga pulau-pulau seperti pulau Irian, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sulit bergerak dan berkembang. Apabila kasus ini dibiarkan begitu saja, dimungkinkan akan terjadi kecemburuan sosial antar daerah dan tidak kondusifnya aktivitas politik Indonesia, sehingga efek jangka panjang dapat menyebabkan tidak meratanya kesejahteraan rakyat, yang akan memunculkan konflik antar daerah.

Mengikuti argumen banyak ahli (Moon, 2001, Yong, 2003; Haris, 2007; Brown, 2007) argumen pokok penulisan ini dibangun atas beberapa argumen penelitian terdahulu yang dirangkum sebagai berikut. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada tatanan aspek sosial dan politik. Kedua, bahwa desentralisasi merupakan perwujudan dari upaya demokrasi yang ada disuatu negara, dimana dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah mendapatkan

wewenang membentuk regulasi wilayahnya sendiri. Ketiga, dalam perkembangannya, sistem desentralisasi memunculkan jaringan desentralisasi dengan memanfaatkan teknologi internet yang biasa disebut dengan e-government atau e-gov. Keempat, adanya jaringan terdesentralisasi memunculkan dampak bagi negara tersebut, baik dapat berdampak negatif maupun positif dalam lingkup sosial dan politik. Sehingga bisa dirumuskan bahwa e-government sebagai implikasi dari jaringan terdesentralisasi merupakan hal yang kompleks yang harus dikelola dengan baik

2. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Penulis memaksimalkan literatur-literatur yang mendukung dari jurnal, buku dan data di internet untuk diolah secara sistematis dan mendalam agar menghasilkan pemahaman yang mendalam. Diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai e-government sebagai sistem yang terdesentralisasi di Indonesia dan bagaimana implikasinya ke sosial dan politik.

3. LANDASAN TEORI

Memahami Sistem Desentralisasi

Perubahan sistem menjadi demokrasi diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah pada saat orde baru yang cukup pelik. Banyaknya hak-hak masyarakat dirampas, dan sulitnya masyarakat untuk aktif dalam aktivitas politik di negaranya sendiri disebabkan pemerintahan yang otoriter yang sangat kontras dengan konsep demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia membuat beberapa pembaruan yaitu penerapan kebijakan yang pro rakyat. Salah satu bentuk realisasi program tersebut adalah kebijakan yang terdesentralisasi.

Kebijakan desentralisasi adalah struktur pemerintahan yang menghasilkan pemerintah lokal, dimana dengan sistem ini diharapkan bisa mempererat hubungan rakyat dengan pemerintah (Haris, 2007). Peraturan ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya keputusan TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang diharapkan dapat memberikan dampak pemerataan kesejahteraan terhadap masing-masing daerah dan upaya ini merupakan cara untuk membangun *good governance* di Indonesia.

Haris (2007) mengatakan desentralisasi menganut konsep “*local government*” dimana sistem pemerintahan bukan merupakan sistem yang terpusat tetapi adanya penyerahan dan pembagian wewenang kepada pemerintah lokal untuk mengelola, mengatur dan menetapkan kebijakannya sendiri, yang dianggap lebih mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakatnya, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat pada sasaran, dan akan terbentuk lingkungan yang demokratis pada masyarakat. Terbentuknya *good governance* pada suatu negara mengidentifikasikan bahwa proses demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) pada negara tersebut sudah berjalan dengan baik. Dimana menurut Alfredsson (2002) standar HAM yang berdasarkan instrumen hukum dijadikan alat dalam pembentukan komunitas demokrasi dan *good governance*.

Di sisi lain, sistem terdesentralisasi pada suatu negara tidak selalu dipandang positif bagi sebagian orang, adanya pandangan-pandangan negatif dan kecemasan apabila negara memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pemerintah daerah, dimana

dimungkinkan munculnya konflik-konflik vertikal (antara pemerintah dan masyarakat atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah) maupun horizontal (antar masyarakat) pada negara tersebut (Haris, 2007), lebih buruknya lagi ini memungkinkan adanya kesewenang-wenangan dari pemerintah daerah apabila sistem ini tidak dijalankan dengan benar. Mengambil argumentasi dari Paulus Wirutome, pemerintahan yang terdesentralisasi hanya akan berhasil pada saat; pertama, adanya kesadaran pemerintah maupun masyarakat antar daerah terhadap ideologi, cita-cita dan nilai bangsa yang diwujudkan dengan sistem desentralisasi tersebut. Kedua, adanya kesadaran terhadap mamfaat dan ketergantungan fungsional akan sistem desentralisasi pada tiap-tiap daerah dalam suatu kesatuan bangsa. Ketiga, keaktifan dari pemerintah pusat untuk menjaga komitmen bersama mengenai desentralisasi daerah untuk menjaga persatuan. (dikutip dari Haris, 2007, h.155-156). Argumen ini menunjukkan bahwa gagasan dari desentralisasi tidak dengan mudahnya diterapkan, harus adanya rasa kesadaran dan kontribusi dari berbagai pihak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Government : Langkah Menuju Open Government Dan Good Governace

Sebagai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintah Indonesia membentuk suatu sarana bagi masyarakat untuk pencarian informasi dan kemudahan pelayanan secara terbuka. Mengikuti perkembangan zaman, pemerintah mulai melihat peluang yang dimiliki oleh teknologi dalam mempermudah akses kepada masyarakat. Adanya perkembangan industri komunikasi yang semakin pesat, layanan melalui komputer dan internet menjadi salah satu pilihan yang sangat strategis, salah satu contohnya adalah jaringan *e-government*. Menurut James

SL Yong dalam bukunya yang berjudul “*E-government in Asia, Enabling Public Service*” tahun 2003 mengatakan bahwa *e-government* merupakan hasil dari *e-democracy*, yang merupakan suatu terobosan kebijakan terbaru dari pemerintah, ini menunjukkan bahwa ada kesadaran dari pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam membentuk partisipasi dari rakyatnya.

Menurut UNDP (United Nation Development Programme) *e-government* merupakan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi internet yang dibuat oleh pemerintah sebagai sarana informasi dan komunikasi untuk masyarakat, proses pelayanan yang digunakan secara cepat dan tepat, sehingga dapat menghemat waktu dan lebih modern (dikutip oleh Setyadiharja, 2017). Pada dasarnya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sering digunakan untuk peningkatan inovasi agar mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, sehingga keefektifitasan ini telah menjadi salah satu dari elemen inti reformasi informasi pada negara tersebut (Moon, 2001).

Secara umum terdapat tiga perspektif dari *e-government* dalam berbagai sektor yaitu *government to government*, *government to business* dan *government to citizen* (Yong, 2003, h.13-14). *Government to government* mencakup wilayah dalam rangka berbagi data dan transaksi antara pemerintah dan pemerintah, biasanya cakupan ini lebih internal dalam sebuah lembaga dan hanya bisa diakses oleh lembaga pemerintahan tersebut. *Government to business*, merupakan salah satu fungsi *e-government* dalam membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan bisnis, dengan cara ini dapat memudahkan perusahaan untuk mengurus berbagai hal terkait dengan perusahaan dan pemerintah seperti urusan regulasi, pajak, legal compliance, surat-menyurat dengan menggunakan internet. Selanjutnya *government to*

citizen, merupakan keterbukaan peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah, pada wilayah *government to citizen* akan berfokus kepada *consumer centric* atau *service* melalui elektronik yang mencakup “*one-stop shop*” dimana masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi dan kemudahan dalam satu platform sesuai dengan keperluannya dan kebutuhannya.

Dalam membangun sistem *e-government* yang kondusif Yong (2003) merumuskan beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga akan menghasilkan *high-level of e-government*, yaitu Pertama, *accessibility*, yaitu adanya kemudahan akses, intuitif, dan menjadi pusat pengambilan informasi, kedua *availability*, yaitu tersedianya akses tersebut diberbagai wilayah di negara tersebut, dapat diakses dari rumah, kantor maupun di lingkungan publik. Ketiga *Security* dan *Accountability*, yaitu mempunyai standar pengamanan online yang kuat, sehingga meminimalisir kemungkinan adanya *cybercrime* seperti *hacking*. Dan juga adanya pengamanan privasi dan keabsahan informasi yang disediakan. Keempat, *Integrate-bility*, yaitu kemampuan *e-government* untuk berintergrasi dengan berbagai platform. Dan kelima, *Sustainability*, yaitu keberlanjutan dari aktifitas *e-government*, termasuk pemeliharaan website, sehingga *e-government* dapat terus berkembang. (Yong, 2003, h.29)

Terdapat empat implementasi teknologi komunikasi terhadap lembaga atau organisasi (Abrar, 2003, h.32-33) yang pada kasus ini dikaitkan dengan *e-government* di Indonesia. Pertama, Manajemen sistem. Merupakan implikasi dari fungsi teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil dari sistem lembaga tersebut, dengan munculnya *e-government*, pemerintah lebih mudah dan cepat untuk berinteraksi langsung dengan rakyatnya, contohnya salah satu kota yang cukup aktif dengan

e-government nya adalah surabaya, menurut Emil Darkak saat upacara peringatan hari jadi kota Surabaya mengatakan bahwa pemkot Surabaya dinilai telah sukses menerapkan *e-government* dan mendorong adanya efisiensi” (Rastika,2017). Beberapa cabang dari *e-government* yang diciptakan oleh pemkot Surabaya seperti *E-Sdm*, *E-monitoring*, *E-education*, *E-office*, *E-permit*, *E-Health* dan *Media Center* (Surabaya.com), melalui website ini masyarakat dapat memilih program sesuai kebutuhan mereka secara tepat dan cepat, disamping itu pekerjaan dari pemerintah menjadi terbantu dikarenakan mendidik masyarakat menjadi lebih mandiri. Mengacu pada pengembangan *e-government* Surabaya, tentunya ini dapat dijadikan acuan bagi daerah-daerah lain untuk lebih memperhatikan jalannya *e-government* tersebut.

Kedua, Proses birokrasi. Teknologi komunikasi (*e-government*) dapat mengubah kebijakan-kebijakan yang ada pada lembaga di pemerintahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa desentralisasi mengubah struktur pemerintahan di Indonesia dan *e-government* telah mengubah birokrasi mengenai keterbukaan informasi, sehingga pemerintah harus melakukan transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, Pengembangan organisasi, adanya peningkatan dan pengembangan partisipasi di lembaga tersebut, dimana dalam *e-government* masyarakat kini turut berpartisipasi dalam kegiatan dipemerintahan baik dalam bentuk langsung ataupun komentar, ini dimungkinkan karena adanya akses langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Keempat, tawar menawar, yaitu adanya proses kompromi pada aktifitas teknologi komunikasi yang menghasilkan jalan keluar untuk kepentingan bersama, dengan adanya *e-government* membuat kepentingan dari masyarakat dan pemerintah berjalan

dengan efisien, dimana rakyat dapat menikmati kemudahan akses melalui internet dan sebaliknya pekerjaan pemerintah akan lebih ringan.

Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya. Menurut Indrajid (2004) terdapat tiga tantangan besar yang harus dihadapi suatu negara dalam mengembangkan konsep *e-government*. Pertama, mengenai akses akses dapat berupa digital maupun teknologi yang digunakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam penggunaan *e-government* tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, indeks pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih berada ditingkat menengah yaitu 5,07¹. Pemerataan pada setiap daerah masih menjadi tantangan. Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan pengembangan infrastruktur pada Indonesia bagian timur seperti Jayapura, Maluku (Permadi,2015). Kedua, mengenai keterlibatan dari pihak swasta maupun non komersial dalam pengembangan infrastruktur tersebut. Ketika hanya mengharapakan peran aktif dari pemerintah, maka kurang dapat memacu pengembangan *e-government* di Indonesia. Perlunya dibuka jalur kerjasama untuk keberhasilan penciptaan layanan masyarakat yang dikenal dengan kata “*mixed economy*” . Ketiga, mengenai program manajemen pengembangan *e-government* terkait biaya, investasi dan oprasional,. Hal tersebut dikarenakan dalam pengembangan proyek, tentulah dana yang dibutuhkan tidak sedikit

Dari ketiga tantangan tersebut, Indonesia masih terus berjuang dalam pengembangan dan peningkatan jalannya *e-government*. Apabila berkaca dari Korea Selatan yang dinilai sebagai negara yang sangat baik dalam menjalankan program *e-government*, ketiga tantangan tersebut tampaknya

¹ Skala Indeks 0-10

dapat dialalui oleh Korea. Dimana ini diperkuat oleh perkataan , Hyun Seok Kim (2017) seorang CEO di Terra Consuling Group (TCG) Korea yang mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi landasan keberhasilan proyek *e-government* Korea yaitu, pertama, adanya komitmen dari pemerintah korea untuk mengembangkan *e-government* dengan didukung oleh oleh infrastruktur politik dan infrastruktur teknik, kedua, proyek *e-government* Korea dipimpin langsung oleh presiden, sehingga mampu memadukan organisasi pemerintahan dengan sektor swasta dengan pengawasan dan pengaturan melalui Kementerian Perencanaan dan Penganggaran. Ketiga, setiap kesepakatan diputuskan bersama antara, pemerintah, , media massa, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang menghasilkan dukungan luas dari publik. Keempat, kerjasama yang solid antarlembaga sehingga mampu mengatasi konflik internal dan mendapat dukungan eksternal semisal organisasi negara maju (OECD) dengan mengedepankan proses perencanaan strategik yang mampu memadukan kinerja monitoring pelaksanaan dan dukungan dasar legitimasi (hukum) yang kokoh dengan lahirnya the *Electronic Government Act*. (Muttaqin, 2017)

Implikasi *E-government* : Sosial dan Politik

E-government dapat dilihat sebagai representasi sistem desentralisasi di Indonesia, kompleksitas dari fungsi *e-government* tersebut memberikan dampak-dampak yang beragam pada struktur sosial dan politik. Aspek tersebut dapat menjadi suatu perubahan cara pandang dari tatanan sosial dan politik yang dapat ditinjau dari aspek negatif dan positifnya.

Eksistensi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini memeberikan dampak yang cukup besar bagi sosial masyarakat, sebagai

contoh terbentuknya masyarakat global yang berorentasi kepada teknologi dimana habataan jarak dan waktu tidak menjadi halangan bagi masyarakat global dalam menyebarkan dan mengakses informasi. Perubahan yang terjadi juga terlihat dari aktivitas yang ada dimasyarakat yang dapat dilihat dari bagaimana ketergantungan masyarakat kepada teknologi, sehingga dapat diartikan bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari masyarakat saat ini.

E-government sebagai salah satu produk dari teknologi memberikan dampak yang beragam. Dalam perkembangannya teknologi *e-govenment* juga dapat mendidik masyarakat, menjadi masyarakat global dimana masyarakat mampu untuk berfikir secara luas, sehigga mereka mengerti bahwasanya mereka hidup dalam keberagaman yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk heterogenitas (Puswasito, 2015), masyarakat global yang berbasis internet tersebut membuat mereka mempunyai wawasan yang lebih luas dan kesadaran penuh mengenai perbedaan. Implikasi positifnya juga dapat dilihat dari berubahnya cara pandang mayarakat. Dengan adanya *e-government* membuat masyarakat lebih bebas untuk berinteraksi dan meg-akses informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintah. Dengan fungsi *e-government* tersebut informasi akan lebih memudahkan hubungan komunikasi pemerintah dan masyarakat, kebijakan-kebijakan dapat disebarluaskan secara cepat dan nantinya masyarakat bisa memberikan feedback untuk pemerintah. (Kasemin 2015) sebagai contoh dahulu apabila masyarakat ingin mengurus sesuatu yang bekaitan dengan urusan negara, seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, atau surat-surat lainnya, maka mereka harus pergi ke kantor pemerintahan dan melakukan beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan organisasi tersebut.

Cara ini tentu dipandang kurang efektif dikarenakan akan menghabiskan waktu dan biaya. Akan tetapi hadirnya teknologi e-government tersebut menjadi “jembatan” bagi masyarakat untuk mengurus segala keperluan mereka secara mudah, contohnya melalui website *e-government* Surabaya yang memungkinkan masyarakatnya untuk mengunduh formulir-formulir seputar pengurusan administrasi pemerintahan melalui internet.

Aspek lain yang terjadi adalah keikutsertaan masyarakat dalam *e-government* proses perpolitikan. Masyarakat kini lebih mengerti mengenai seluk beluk pemerintahan yang dahulunya hal-hal yang berhubungan dengan dunia perpolitikan hanya diusrus oleh pemerintah, kini masyarakat turut berpartisipasi dan juga dibantu dengan aktifnya media masa saat ini seperti pemberitaan di koran, televisi, ataupun internet menyebabkan hubungan dua arah antara pemerintah dan rakyatnya (Yong, 2003)

Akan tetapi perkembangan *e-government* ini kurang disertai dengan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan peningkatan fasilitas pendukung pelayanan, sehingga pada faktanya belum semua warga Indonesia dapat menikmatinya. Masalah lain juga timbul dikarenakan sebahagian masyarakat masih belum bisa menggunakan internet dengan baik, seperti kurangnya pengetahuan mengenai internet atau bahkan beberapa tidak mempunyai komputer atau handphone yang dapat terhubung dengan internet, sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalan konvensional. Kasus seperti ini biasanya sering terjadi kepada orang-orang yang sudah berumur, yang memang tidak mempunyai minat akan teknologi, sehingga penggunaan lebih sering dinikmati oleh kaum muda hingga dewasa. Disamping itu fasilitas internet ditempat-tempat tertentu masih belum memadai seperti dipedesaan yang

memang tidak memungkinkan untuk dibangun akses tersebut, dikarenakan pembangunan infrastruktur yang masih kurang seperti jalan, listrik, jembatan penghubung. Ini mengisyaratkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pengoptimalan *e-government* tersebut.

Dalam membahas jaringan yang terdesentralisasi, tentu tidak hanya sebatas pembahasan mengenai masyarakat saja akan tetapi juga dapat berdampak pada tatanan lingkungan politik negara. Sebagai bentuk pengaplikasian dalam tujuannya sebagai pembetulan sistem *good governance* di Indonesia, *e-government* mempunyai implikasi terhadap dunia perpolitikan. Munculnya pengaturan yang terdesentralisasi ini membuktikan suatu negara tersebut menganut sistem demokratis. *E-government* sebagai sarana yang di hadirkan oleh pemerintah untuk rakyatnya, membuktikan proses politik demokrasi telah berjalan di negara tersebut, proses-proses tersebut secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, Menurut Boyle dan Schmierbach (2009), mengatakan bahwa internet menawarkan platform baru untuk wacana politik, kecerdasan kolektif, politik sederhana dengan melibatkan masyarakat akan penyebaran konten politik, dan pengalaman pengguna yang interaktif tentang politik pada situs website (dikutip dari Khazaeli dan Stockemer, 2013, h.465). Jurnalisme warga yang cukup marak pada saat ini memperlihatkan proses keterlibatan warga dalam segala aspek di negara tersebut termasuk mengenai perpolitikan.

E-government juga menyediakan transparansi mengenai kebijakan ataupun anggaran keuangan pemerintah bagi masyarakat, yang diharapkan akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi di dunia perpolitikan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti contohnya pemerintah Pekanbaru menyediakan keterbukaan informasi dan

anggaran mengenai pengadaan barang dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat diakses secara elektronik, disana dapat dilihat dengan jelas mengenai transparansi jumlah dana pengadaan, pembiayaan secara rinci dan masyarakat dapat mengakses kapan saja.

Dari penjelasan diatas bahwasanya banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan *e-government*. Akan tetapi adanya *e-government* masih belum bisa secara keseluruhan menghentikan tindakan-tindakan KKN. Harus disadari bahwa *e-government* hanya sebuah aplikasi yang pengendaliannya dipegang oleh manusia. Ketua KPK Basaria saat launching e-Government Papua pada Rabu 8 Maret 2017 mengatakan (Nurulliah, 2017) "Secanggih apapun aplikasi yang kita buat, tapi tetap saja manusia di belakangnya itulah sebenarnya yang paling utama. Aplikasi ini dibuat oleh manusia, bisa dibelok kiri kanan oleh manusia." (Nurulliah 2017) sehingga dibutuhkan orang-orang yang mempunyai integritas dan moralitas untuk mengatur jalannya aplikasi ini.

Jaringan terdesentralisasi masih dibayangi oleh dampak-dampak politik yang buruk, dimana walaupun salah satu tujuan awalnya adalah ingin memberantas kecurangan terhadap tindakan-tindakan KKN, tetapi sistem desentralisasi juga memungkinkan adanya tindakan kecurangan berskala daerah yang dapat luput dari perhatian pemerintah pusat, contohnya banyaknya kasus-kasus korupsi propinsi. Ini dimungkinkan karena semakin banyaknya daerah-daerah yang diberi wewenang, sehingga pengawasan dari pemerintah pusat tersebut akan semakin sulit. Setiap daerah juga memiliki caranya sendiri dalam mengatur wilayahnya, membuat terdapat perbedaan-perbedaan regulasi yang terjadi, ini menjadi ketakutan sendiri dimana dimungkinkan terjadinya

kesewenang-wenangan dari pemerintah daerah, sehingga dalam penggunaan *e-government* sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang besar dari pemerintah dan masyarakatnya.

5. KESIMPULAN

Sistem yang terdesentralisasi sebagai perwujudan negara demokrasi merupakan suatu hal yang sangat positif, melalui *e-government* sistem demokrasi disuatu negara akan terasa lebih nyata. Dengan pengadopsian fungsi teknologi komunikasi dan informasi oleh *e-government*, menyebabkan terbentuknya beberapa aspek yang terjadi seperti peningkatan pelayanan servis terhadap masyarakat yang akan menghasilkan kemudahan akses di setiap sektor, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari organisasi yang berlandaskan jaringan teknologi yang terintegrasikan, dan juga antara pemerintah dan masyarakatnya akan lebih responsif terhadap sesuatu, sehingga partisipasi akan lebih nyata terasa di negara tersebut, ini dikarenakan bahwasanya tujuan utama yang ingin dibangun dalam pembentukan *e-government* tersebut adalah sebagai cara untuk melakukan improvisasi antara masyarakat dan pemerintah secara terus menerus (Young, 2003). Inisiasi tersebut akan berdampak pada kemudahan membentuk lingkungan sosial dan politik yang kondusif.

Akan tetapi pengembangan *e-government* dalam menciptakan lingkungan demokrasi masih menjadi tantangan bagi Indonesia, dalam hal penerapan masih belum seluruh daerah menggunakan jaringan *e-government* tersebut, walaupun pemerintah pusat sudah sering menghimbau agar penerapan tersebut dapat dilakukan dengan segera, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan kewajiban untuk menerapkan *e-government* di semua pemerintahan di Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Nadlir, 2017). Akan tetapi dalam hal peng-aplikasiannya terjadi beberapa hambatan dikarenakan di Indonesia yang pengembangan *e-government* terlihat belum begitu maksimal karena adanya keterbatasan media atau alat, sumber daya manusia (SDM), dan regulasinya. Sehingga sangat disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi ini dan penyediaan infrastruktur seperti komputer dan internet di daerah-daerah. Perhatian dan pengawasan mengenai regulasi *e-government* dari pemerintah pusat terhadap setiap daerah sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah lokal dalam membuat kebijakan dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat saling berkontribusi dalam pemamfaatan *e-government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredsson, G. (2002). The usefulness of human rights for democracy and good governance. In *Human Rights and Good Governance* (pp. 19-27). Brill Nijhoff.
- Abrar, A. Nadhya, (2003), *Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: LESFI
- Brown M. Maureen, (2007), *Understanding E-Government Benefits An Examination of Leading-Edge Local Governments*, The American Review of Public Administration, Volume 37 Number 2, diakses 9 Oktober 2017 dari Sage Publication
- Badan Pusat Statistik, 2019, *Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)*, Jakarta
- Haris, Syamsuddin, (2007), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta : LIPI
- Indrajid, R, (2004), *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta : ANDI
- Yong. SL. James, (2003) *E-Government in Asia*, Singapore :Times Editions
- Setyadiharja, Renra, (2017), *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*, Yogyakarta : Budi Utama, diakses 28 Agustus 2017, dari Google E-Books.
- Kasemin, Kasiyanto, (2015), *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta : Prenadamedia Grup
- Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: rhetoric or reality?. *Public administration review*, 62(4), 424-433.
- Muttaqin, (2017), *Menimbang e-Government: Belajar dari Pengalaman Korea Selatan*, <http://nusantara.rmol.co/read/2017/11/08/314331/Menimbang-e-Government:-Belajar-dari-Pengalaman-Korea-Selatan->
- Nadlir. M, (2017) *Reformasi Birokrasi*, Kementrian PAN-RB Luncurkan E-government, Kompas 4 Oktober 2017 diakses dari <http://nasional.kompas.com/re>

- ad/2017/10/04/11271071/reformasi-birokrasi-kementerianpan-rb-luncurkan-egovernment tanggal 9 Agustus 2017
- Nurulliah, Novianti, 2017, KPK: E-Government Masih Berpotensi Korupsi, Pikiran Rakyat 8 Maret 2017 diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/08/kpk-e-government-masih-berpotensi-korupsi-395576> tanggal 28 Agustus 2017
- Purwasito. A, (2015), Komunikasi Multikultural, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Permadi, D, (2015), Menuji Kota-Kota Sekunder Pintar : Pemetaan Pemamfaatan TIK dalam Pelayanan Publik di 12 Kota, Jakarta Selatan : The Habibie Center
- Rastika, Binti, 2017, 17 Pemda Adopsi E-Government Surabaya, Republika 31 Mei 2017 diakses tanggal 28 Agustus 2017 dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/31/oqtex9384-17-pemda-adopsi-egovernment-surabaya>